

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kota Mataram yaitu berupaya untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan atas tanah serta batas-batas tanah dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram melandaskan pelaksanaannya berdasarkan pada amanat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mana meliputi tahapan-tahapan: persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah, pengumuman, pengesahan, penetapan surat, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram terdiri dari hambatan internal yang dialami oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram yaitu kurangnya ketersediaan sapsras (sarana dan prasarana), kurangnya strategi dalam mengsucceskan PTSL, dan sertifikat yang terbit

sebelum pemetaan lengkap dari sistem. Sedangkan Hambatan Eksternal yaitu kurangnya inisiatif dari masyarakat, kurangnya kerjasama antara masyarakat dan petugas di lapangan, serta masyarakat yang kesulitan dalam menyiapkan berkas permohonan dan bukti kepemilikan (alas hak).

B. Saran

Berdasarkan dari penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka Adapun rekomendasi kedepannya:

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk menambah petugas di lapangan, khususnya petugas bagian ukur yang mana dapat mengoptimalkan terlaksananya program PTSL serta adanya kerjasama dengan surveyor berlisensi dengan dilaksanakannya terus menerus.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Mataram untuk mampu bekerja sama dan berperan aktif dalam membantu proses pelaksanaan petugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Effendi, Bachtiar. 2005. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung.
- F.X. Sumarja, 2015. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Penerbit Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Ed. Revisi. Cet.8. Djambatan, Jakarta.
- Herman, Hermit. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Ismay, Samun, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, Moh, 2003. *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Parlindungan, A.P. 1998. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cet.4. RajaGrafindo, Jakarta.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Konprehensif*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sahnan, 2016. *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press Kelompok Intans Publishing, Malang.
- Soekanto, Soejono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suhariningsih, 2009. *Tanah Terlantar (Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penerbitan)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2017. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidar, 2014. *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Kelima, Pustaka Bangsa Press, Medan.

B. JURNAL

Ayu, Isdiyana Kusuma. 2020, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Jurnal Hukum. Vol 31, No.3

Devi, Ria Sintha, 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Jurnal Rectum. Vol 1 No. 1

Earlene, Felishella, Dkk. 2019, *Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Polar Rt 07/RW 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cepalo. Vol. 3 No. 2

Handayani Andi Amalia, Yusriyadi, 2019, *Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Jurnal Notarius, Vol 12 No 1

Istiqamah, 2018, *Tinjauann Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah*, Jurnal Jurisprudence, Vol 5 No. 1

Korompis, Syendy A. 2018, *Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Jurnal Lex Privatum. Vol 6 No 1.

Novana, Mira. 2019, *Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Jurnal Gema Keadilan. Vol 6 No. 1

Parmahan Harris Yonatan S, 2011, *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*, Jurnal Hukum, Vol 2 No. 2.

Prakoso, Bhim. 2021, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem*, Jurnal Hukum Privat dan Ekonomi. Vol 1, No. 1

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Termasuk Lembaran-Negara Nomor 104 Tahun 1960)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501)

D. INTERNET

Maria S.W Sumardjono, "*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah*", Makalah, Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya, kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 13 September 1997.

LAMPIRAN



1. Wawancara dengan Bapak Dick Atmajaya, Ketua Adjudikasi PTSL, Kantor Pertanahan Kota Mataram, Tanggal 19 Desember 2023.



2. Wawancara dengan Ibu Sehan Pemohon Sertifikat PTSL, Kota Mataram, Tanggal 27 Desember 2023.



3. Wawancara dengan Ibu Suryani, Pemohon Sertifikat PTSL, Kota Mataram, Tanggal 27 Desember 2023.



4. Wawancara dengan Bapak Mahsud, Pemohon Sertifikat PTSL, Kota Mataram, Tanggal 27 Desember 2023.

